

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Teori Stakeholder*

Stakeholder adalah pihak yang berkepentingan dalam perusahaan yang menginginkan informasi finansial dan non-finansial satu perusahaan. Teori *stakeholder* memberikan tekanan pada posisi para *stakeholder* yang memiliki kekuasaan dalam melakukan pertimbangan utama bagi perusahaan dalam mengungkapkan dan/atau tidak mengungkapkan suatu informasi di dalam laporan keuangan (Sunarto,2016). Menurut Chariri dan Ghazali (2007) dalam Rahayu dan Cahyati (2014) mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya (*stakeholder*, kreditur, konsumen, *supplier*, pemerintah masyarakat, analisis dan pihak lain).

Suatu aktivitas perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar dan dari dalam perusahaan, dan keduanya dapat disebut sebagai *stakeholders*. Dalam usahanya mendapatkan dukungan dari *stakeholders* dilakukan dengan melakukan pengungkapan CSR pada laporan tahunan. Pengungkapan tanggungjawab sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholder*-nya (Rahayu dan Cahyati,2014). Dalam hal ini teori *stakeholder* berkaitan dengan Profitabilitas yang dapat

menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya kepada para pemegang saham (Taufik dkk, 2015).

2. Teori Legitimasi

Menurut Hadi (2011) dalam jurnal yang dibuat oleh institusi pendidikan lembaga riset legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap lingkungan sekitar baik fisik maupun non fisik. Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan harus berkelanjutan dalam meyakinkan masyarakat bahwa aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di sekitar lingkungan sosial tempat perusahaan menjalankan visi dan misinya.

Menurut Reverte (2009) dalam Mandaika dan Salim teori legitimasi mengakui bahwa aktivitas perusahaan dibatasi oleh kontrak sosial dimana dalam kontrak tersebut disebutkan bahwa perusahaan akan melaporkan kegiatan sosialnya agar memperoleh pengakuan dan diterima oleh masyarakat karena hal tersebut dapat menjamin kelangsungan hidup perusahaan.

Menurut Khoirrudin (2013) menyatakan bahwa legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dalam hal ini yang berkaitan dengan teori legitimasi adalah keterkaitan antara struktur *Good Corporate Governance* dalam hal ini adalah ukuran Dewan Pengawas Syariah, komposisi Dewan Komisaris Independen dan ukuran Dewan Komisaris karena dapat mendorong

manajemen selaku pelaksana operasi perusahaan untuk mengungkapkan CSR agar regulasi dari Bank Indonesia terpenuhi serta menjalankan fungsi bank syariah yang turut mengupayakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.

3. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Rahayu dan Cahyati (2014) menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan tersebut. Dewan Pengawas Syariah memegang peranan penting dalam perusahaan syariah, mereka memiliki kewajiban untuk memberikan masukan kepada pihak manajemen perbankan syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam bank syariah merupakan penentu dalam semua pelaksanaan transaksi dan produk yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Laporan Dewan Pengawas Syariah dibuat untuk meyakinkan para *stakeholders* bahwa perusahaan telah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip syariah.

Ciri khas bank syariah adalah adanya Dewan Pengawas Syariah. Tata kelola bank yang berlandaskan pada syariat-syariat Islam, tentunya memiliki beberapa batasan-batasan yang tidak dapat dilanggar. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah sebagai *auditor sharia compliance* (termasuk praktik akuntansi). Menurut Widiastuti dan Firman (2016), seorang Dewan Pengawas Syariah harus memiliki pemahaman yang cukup tentang syariah dan isu mengenai ekonomi karena beberapa kasus yang ada di bank syariah mengalami *overlapping* satu sama lain.

4. Profitabilitas

Menurut Munawir (2010) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dan sejauh mana keefektifan pengelolaannya. Hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan profitabilitas perusahaan diyakini mencerminkan pandangan bahwa reaksi sosial memerlukan gaya manajerial yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk membuat suatu perusahaan memperoleh keuntungan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosialnya. Sebaliknya, apabila profit perusahaan menurun, manajer akan cenderung mengurangi informasi yang diungkapkan dengan tujuan untuk menyembunyikan alasan-alasan mengapa profit perusahaan mengalami penurunan.

5. Komposisi Dewan Komisaris Independen

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Komisaris Independen diharapkan mampu meningkatkan independensi Dewan Komisaris terhadap kepentingan pemegang saham serta mampu menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lainnya. Jika proporsinya semakin tinggi, maka Dewan Komisaris Independen diharapkan lebih objektif dalam mengambil keputusan untuk

melindungi pihak pemangku kepentingan. Dengan pengawasan yang lebih objektif, maka pengelolaan perusahaan juga akan dilakukan dengan cara yang baik, serta dalam mengungkapkan informasi pihak manajemen akan mengungkapkannya secara luas, termasuk pengungkapan ISR (Kurniawati dan Yaya, 2017).

6. Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran Dewan Komisaris yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan (Sembiring, 2005). Sedangkan menurut Rustam (2013:400) Dewan Komisaris adalah organisasi perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas: jumlah, komposisi, kriteria, rangkap jabatan, hubungan keluarga, dan persyaratan lain bagi anggota Dewan Komisaris tunduk kepada ketentuan otoritas terkait. Adanya Dewan Komisaris didalam perusahaan diharapkan mampu mendorong terciptanya sistem pengendalian yang baik bagi pihak manajemen perusahaan. Semakin banyak jumlah Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan, maka pengawasan dalam perusahaan akan semakin baik. Adanya pengawasan yang baik diharapkan pengungkapan ISR semakin luas (Kurniawati dan Yaya, 2017).

Dewan Komisaris mempunyai wewenang untuk memberikan petunjuk, arahan dan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan, salah satunya adalah dengan memberikan petunjuk kepada pihak manajemen untuk mengungkapkan *Islamic Social Reporting*. Dengan jumlah anggota

Dewan Komisaris yang lebih besar akan memudahkan pengendalian terhadap agen dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif sehingga dapat mengurangi tindakan menyimpang dari agen (Amalia, 2013).

7. Bank Syariah

Dalam UU No. 21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian Perbankan Syariah dan pengertian Bank Syariah. Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

8. Islamic Social Reporting

Islamic Social Reporting (ISR) adalah ukuran yang digunakan oleh para peneliti untuk menilai seberapa besar pengungkapan tanggung jawab sosial menurut pandangan syariah. Tanggung jawab sosial (CSR) merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas perusahaan terutama untuk perbankan syariah yang beroperasi dengan berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Menurut Haniffa (2002), tujuan ISR adalah sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat serta meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan menyajikan informasi yang relevan dengan memperhatikan kebutuhan spiritual investor muslim atau kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan.

Haniffa (2002), menjelaskan bahwa ada 5 tema pengungkapan ISR, yaitu Tema Pendanaan dan Investasi, Tema Produk dan Jasa, Tema

Karyawan, Tema Masyarakat, dan tema Lingkungan Hidup. Kemudian dikembangkan oleh Othman et al (2009) dengan menambahkan satu tema pengungkapan yaitu Tema Tata Kelola Perusahaan.

a. Pendanaan dan Invetasi (*Finance & Investmen*)

Informasi yang akan diungkapkan adalah sumber pembiayaan dan investasi yang bebas bunga (riba) dan spekulatif (*gharar*) karena ini adalah sangat terlarang (haram) dalam Islam (Cahya dan Hanifah, 2016). Sebagaimana disebutkan pada QS. Al Baqarah ayat 278-279 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertawakalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.

b. Produk dan Jasa (*Products & Services*)

Konsep ini merupakan tanggung jawab perusahaan untuk mengungkapkan semua produk atau jasa yang jatuh kedalam kategori haram (dilarang) seperti minuman keras, babi, transaksi senjata, perjudian, dan hiburan. Muslim benar-benar peduli dengan status halal dari produk atau jasa (Cahya dan Hanifah, 2016). Hal ini didukung oleh hadist berikut: *“sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung”.* (HR. Bukhari dan HR. Muslim)

c. Karyawan (*Employes*)

Dalam *Islamic Social Reporting* segala sesuatu yang berkaitan dengan karyawan berawal dari konsep etika amanah dan adil. Karyawan harus diperlakukan secara seadil-adilnya dan dibiayain secara wajar. Pemberi kerja juga harus memenuhi kewajibannya terhadap karyawannya dalam hal kebutuhan spiritual. Masyarakat Islam perlu tahu jika perusahaan ditangani secara adil dengan karyawan melalui informasi seperti upah, sifat pekerjaan, jam kerja per hari, cuti tahunan, kesehatan dan kesejahteraan, kebijakan mengenai hal-hal keagamaan seperti waktu shalat dan tempat, pendidikan dan pelatihan dukungan kepada karyawan, kesempatan yang sama dan lingkungan kerja (Cahya dan Hanifah, 2016).

d. Masyarakat (*Community Involvement*)

Kebutuhan umat atau masyarakat luas dapat dicapai melalui *saddaqa* (amal), wakaf (*trust*) dan *Qardhassan* (pinjaman tanpa profit). Perusahaan-perusahaan harus mengungkapkan perannya dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan mengatasi masalah sosial seperti: beasiswa, perumahan dan lain-lain dari masyarakat dimana mereka beroperasi (Cahya dan hanifah, 2016). Seperti yang tercantum dalam QS. Al Baqarah ayat 271 yang artinya:

“Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”

e. Lingkungan Hidup (*Environment*)

Islam mengajarkan kepada seluruh umat agar dapat menjaga, memelihara dan melestarikan bumi beserta isinya. Dengan kata lain perusahaan tidak seharusnya terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang merusak serta membahayakan lingkungan sekitar. Konsep yang mendasari tema ini adalah *mizan, i'tidal, khilafah dan akhirah*.

Dalam buku Othman tahun 2010 halaman 138 yang terdapat dalam jurnal Cahya dan Hanifah (2016) perusahaan tidak seharusnya terlibat dalam setiap jenis kegiatan yang mungkin menghancurkan atau merusak lingkungan. Dengan demikian, informasi yang terkait dengan penggunaan sumber daya dan program yang dilakukan untuk melindungi lingkungan harus diungkapkan.

f. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tata kelola perusahaan dalam sistem ekonomi Islam memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan tata kelola perusahaan dalam sistem ekonomi konvensional (Raditya, 2012). Tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem hak, proses dan kontrol secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan *stakeholders*. Prinsip dalam konsep *corporate governance* perusahaan harus mengungkapkan semua kegiatan yang dilarang seperti praktek monopoli, penimbunan barang yang diperlukan, memanipulasi harga, permainan dan segala jenis kegiatan yang melanggar hukum (Cahya dan Hanifah, 2016).

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Daftar Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Penulis & Tahun	Variabel Yang Digunakan	Hasil
1.	Rahayu dan Cahyati (2014)	Variabel Dependen: <i>Corporate Social Responsibility.</i> Variabel Independen: Dewan Pengawas Syariah, Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Dewan Komisaris.	Variabel Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Pengungkapan CSR, namun variabel lainnya tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan CSR pada Perbankan Syariah tahun 2010-2014.
2.	Anggraini dan Wulan (2015)	Variabel Dependen: <i>Islamic Social Reporting.</i> Variabel Independen: <i>Size</i> , Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Jenis Industri, dan Ukuran Dewan Komisaris.	Semua variabel yang digunakan berpengaruh terhadap tingkat Pengungkapan ISR
3.	Othman <i>et al.</i> (2009)	Variabel Dependen: <i>Islamic Social Reporting.</i> Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Ukuran Dewan Direksi Muslim, Tipe Industri	Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Ukuran Dewan Direksi Muslim berpengaruh pada tingkat Pengungkapan ISR, sedangkan Tipe Industri tidak berpengaruh terhadap tingkat Pengungkapan ISR.
4.	Febry Ramadhani (2016)	Variabel Dependen: <i>Islamic Social Reporting.</i> Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Dewan Pengawas Syariah.	Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap tingkat Pengungkapan ISR, sedangkan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tingkat Pengungkapan ISR.
5.	Ratna Aditya Ningrum, Fachrurrozie, Prabowo Yudo Jayanto (2013)	Variabel Dependen: <i>Islamic Social Reporting.</i> Variabel Independen: Kinerja Keuangan, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah.	Kinerja Keuangan, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Pengungkapan ISR.
6.	Bayu Tri Cahya, Amiur Nuruddin, Arfan Ikhsan (2017)	Variabel Dependen: <i>Islamic Social Reporting.</i> Variabel Independen: <i>The Perspective of Corporate Governance,</i>	<i>Corporate Governance</i> dan Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Pengungkapan ISR. Ukuran Perusahaan memiliki

No.	Penulis & Tahun	Variabel Yang Digunakan	Hasil
		<i>Strength, Media Exposure and The Characteristics of Sharia Based Companies in Indonesia and its Impact On Firm Value.</i>	signifikan negatif dan keterpaparan media tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan ISR.
7.	Taufik, Marlina Widiyanti, Rafiqoh (2015)	Variabel Dependen: <i>Islamic Social Reporting Index.</i> Variabel Independen: <i>Islamic Governance Score, Leverage, dan Profitabilitas.</i>	Sebagian besar <i>Islamic Governance Score dan Leverage</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pengungkapan ISR. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap ISR.
8.	Muhammad Fajrul Novrizal dan Meutia Fitri (2016)	Variabel Dependen: <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> Variabel Independen: Profitabilitas, Jenis Industri, Kinerja Lingkungan Hidup, dan Ukuran Perusahaan	Profitabilitas berpengaruh tidak signifikan, Jenis Industri tidak berpengaruh signifikan, Kinerja Lingkungan Hidup berpengaruh signifikan, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.
9.	Mahardika Kurniawati dan Rizal Yaya (2017)	Variabel Dependen: <i>Islamic Social reporting.</i> Variabel Independen: Ukuran dewan Komisaris, Profitabilitas, Kinerja Lingkungan, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit.	Ukuran Dewan Komisaris, Profitabilitas, dan Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap Pengungkapan ISR. Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan ISR.
10.	Wardatul Baidok dan Dina Fitriasia Septiarini (2016)	Variabel Dependen: <i>Islamic Social Reporting.</i> Variabel Independen: Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Syariah, dan Frekuensi rapat Komite Audit.	Dewan Komisaris, Komposisi dewan Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah, dan Frekuensi Rapat Komite Audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan ISR.

C. Kerangka Pemikiran

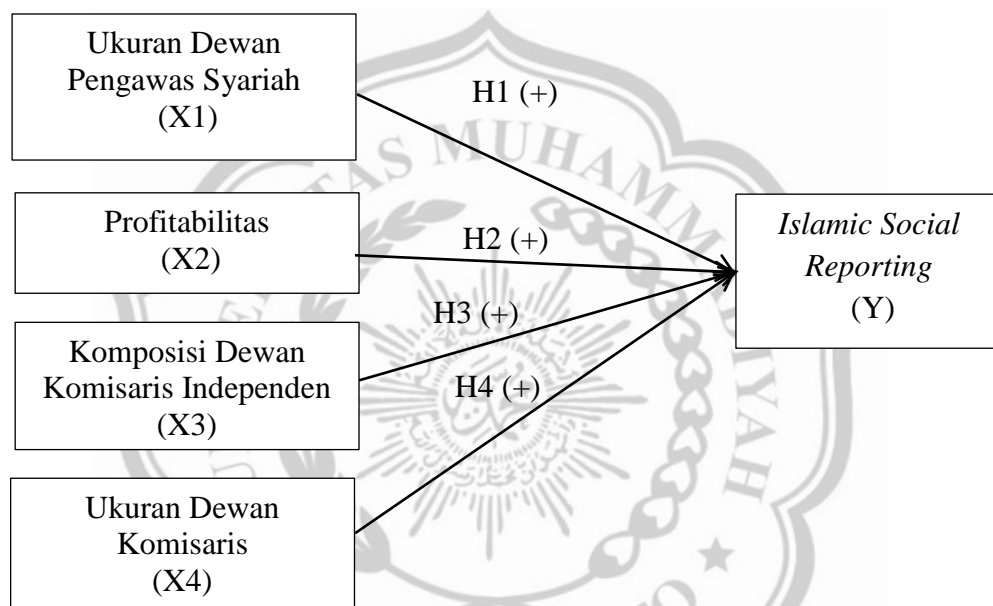
Kerangka pemikiran ini menggambarkan hubungan antara variabel *independen* yaitu ukuran Dewan Pengawas Syariah (X1), Profitabilitas (X2), komposisi Dewan Komisaris Independen (X3) dan ukuran Dewan Komisaris (X4) terhadap variabel *dependen* yaitu *Islamic Social Reporting* (Y). Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*, yaitu semakin besar jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah, maka kinerja bank semakin efektif sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial secara Islami juga akan meningkat.

Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting* yaitu semakin tinggi profitabilitas berarti semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga akan semakin luas pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. Komposisi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting* yaitu Komisaris Independen berkewajiban untuk memberikan nasihat dalam pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris, sehingga jika jumlah anggota Dewan Komisaris Independen semakin besar maka akan semakin besar pengawasan terhadap keputusan CEO dalam pelaksanaan kegiatan.

Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting* yaitu Dewan Komisaris memiliki peran yang penting karena bertugas mengawasi perusahaan dan menyampaikan semua informasi kepada *stakeholders*, termasuk informasi pengungkapan tanggung jawab sosial. Terkait dengan pengungkapan informasi oleh perusahaan, semakin besar

ukuran Dewan Komisaris, maka pengawasan akan semakin baik. Dengan pengawasan yang baik, maka diharapkan pengungkapan ISR akan semakin luas karena dapat meminimalisir informasi yang mungkin dapat disembunyikan oleh manajemen. Berikut adalah kerangka pemikiran dalam penelitian ini:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini akan menguji dan menganalisis faktor-faktor berupa ukuran Dewan Pengawas Syariah, Profitabilitas, komposisi Dewan Komisaris Independen, dan ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Sehingga perumusan hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap *Islamic Social Reporting*

Dewan pengawas syariah mempunyai peran yang penting dalam pengungkapan *Islamic Social Reporting* perbankan syariah. Mereka memiliki kewenangan untuk memberikan masukan dan memperingatkan pihak manajemen perbankan syariah tentang pengelolaan dan kebijakan manajemen dalam kaitannya dengan prinsip syariah (Khasanah dan Yulianto, 2015).

Menurut Khoirrudin (2013) semakin banyak jumlah Dewan Pengawas Syariah dapat meningkatkan level pengungkapan. Semakin besar jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah, maka kinerja bank semakin efektif sehingga pengungkapan tanggungjawab sosial secara Islami juga meningkat.

Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan kompetensi merupakan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah dan di bidang keuangan secara umum. Dewan Pengawas Syariah akan menjalankan tugasnya dalam memastikan kepatuhan suatu bank syariah terhadap hukum dan prinsip Islam yang lebih baik dan diharapkan mereka juga berperan dalam mewajibkan aktivitas sosial dan juga pengungkapan *Islamic Social Reporting* bank syariah, sehingga dapat diperkirakan bahwa bank dengan keberadaan Dewan Pengawas Syariah akan melakukan pengungkapan *Islamic Social Reporting* yang lebih baik (Ramadhani, 2016).

Ramadhani (2016) dan Ningrum, dkk (2013) menyatakan bahwa ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap

pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₁: Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Bank pada posisi menguntungkan akan cenderung melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas dalam laporan tahunannya. Bank dengan profitabilitas yang tinggi, membuat manajemen memiliki kebebasan dan kemudahan untuk menyatakan program tanggung jawab sosialnya yang luas kepada para *stakeholders*.

Menurut Othman et al (2009) apabila perusahaan sedang mendapatkan keuntungan yang tinggi maka manajer akan termotivasi untuk mengungkapkan informasi rinci dalam rangka mendukung kelanjutan posisi mereka dan remunerasi. Sedangkan ketika keuntungan menurun maka manajer akan memberikan informasi yang kurang dalam rangka menyembunyikan alasan kerugian atau keuntungan yang menurun. Oleh karena itu, akan lebih menguntungkan bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Semakin banyaknya keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan tersebut maka perusahaan dapat menanggung biaya yang lebih tinggi untuk membuat pengungkapan laporan sosial yang lebih luas (Taufik dkk, 2015). Sejalan dengan teori *stakeholder* berkaitan dengan

profitabilitas yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya kepada para pemegang kepentingan.

Perusahaan dengan profit yang tinggi akan melakukan pengungkapan *Islamic Social Reporting* sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada para pemilik modal atas dana-dana yang telah diinvestasikan. Perusahaan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial tidak hanya menjelaskan mengenai apa saja tindakan perusahaan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan, tetapi juga pengungkapan mengenai apakah tindakan operasional, transaksi dan praktik yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan syariah Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini dan Wulan (2015) serta Taufik, dkk (2015) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₂: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

3. Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu komposisi Dewan Komisaris Independen juga berpengaruh sebagai pemantau manajemen dalam pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Semakin banyak Dewan Komisaris Independen dalam

perusahaan maka semakin banyak kontribusi dan saran kepada pihak manajemen untuk mengungkapkan *Islamic Social Reporting* yang lebih luas (Gestari, 2014).

Komisaris Independen berkewajiban untuk memberikan nasihat dalam pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris, sehingga jika jumlah anggota komisaris semakin besar maka akan semakin besar pengawasan terhadap keputusan CEO dalam pelaksanaan kegiatan (Ramadhaningsih dan Utama, 2013). Pengawasan yang lebih objektif, maka pengelolaan perusahaan juga akan dilakukan dengan cara yang baik, serta dalam mengungkapkan informasi pihak manajemen akan mengungkapkannya secara luas, termasuk pengungkapan ISR (Kurniawati dan Yaya, 2017).

Baidok dan Septiarini (2016) menyatakan bahwa komposisi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting* sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Gestari (2014) yang menyatakan bahwa komposisi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₃: Komposisi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

4. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Semakin besar jumlah anggota Dewan Komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan pengawasan yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, maka tekanan terhadap manajemen

juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya (Sha, 2014). Manajemen mempunyai dorongan untuk mengungkapkan suatu informasi yang diumumkan dan menyembunyikan suatu informasi yang tidak diungkapkan. Informasi yang diungkapkan akan diungkapkan seluas-luasnya sedangkan informasi yang tidak diungkapkan tidak akan diungkapkan. Akibatnya, pemegang saham tidak mengetahui secara khusus informasi apa yang disembunyikan (Amalia, 2013).

Menurut Mulyadi (2002) Dewan Komisaris merupakan wakil *shareholders* didalam suatu entitas yang berbadan hukum perseroan terbatas. Selain sebagai wakil *shareholders*, Dewan Komisaris memiliki tugas untuk mengawasi, memberikan pengarahan kepada pengelola perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi) dan bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan serta menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini dan Wulan (2015) serta Khoirrudin (2013) menunjukkan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan, maka semakin luas pengungkapan *Islamic Social Reporting* yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₄: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.